

# STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN BERBASIS KOMUNITAS IBU RUMAH TANGGA DI KELURAHAN KOLO KECAMATAN ASAKOTA KOTA BIMA

Oleh : Lubis Hermanto

(Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Mbojo Bima)

## ABSTRAK

Istilah pemberdayaan masyarakat mulai dibicarakan sekitar tahun 90-an. Istilah tersebut kemudian menjadi pembicaraan tersendiri didalam tubuh Pemerintahan dan mulai disosialisasikan didalam program-program turunan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Ir. Tatag Wiranto, MURP Direktur Kerja Sama Pembangunan Sektorale Bappenas mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat menghasilkan masyarakat yang berdaya bukan yang terpedaya, sehingga mereka mampu mandiri dan tidak tergantung pada uluran tangan bantuan orang lain adapun tujuan: Untuk mengetahui bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis komunitas ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Untuk mendiskripsikan bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis komunitas ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dasar penelitian *survey* yaitu dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang "Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima". Menurut Sugiyono (1994:3) penelitian *survey* adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi secara *intensif* terhadap *subyek* dan *obyek* yang diteliti baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa: 1). Strategi menumbuhkembangkan kesadaran dari komunitas ibu rumah tangga nelayan agar berpartisipasi ikut bekerja untuk menunjang sosial ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil tradisional. 2). Strategi menjadikan komunitas ibu rumah tangga sebagai basis dan memegang peranan sentral dalam mengelola potensi sumberdaya sosial-ekonomi rumah tangga. 3). Strategi memanfaatkan kedudukan dan peranan ibu rumah tangga yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan. 4). Strategi menerapkan diversifikasi pekerjaan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota dikalangan komunitas ibu rumah tangga.

**Kata kunci :** *Strategi, Pemberdayaan, Ekonomi sosial, Ibu rumah tangga.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan terhadap kawasan nelayan hanya didasari oleh perkembangan pemikiran bahwa kawasan nelayan Kolo menyimpan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat nelayan yang akan mengelola Sumber Daya Alam tersebut secara berkelanjutan. Potensi sosial masyarakat ini sangat penting karena sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir lainnya dan hidup dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkembang dan peningkatan. Kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang perikanan (*Revolusi Biru*) selama ini masyarakat nelayan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup dengan nilai tinggi, termasuk yang berada di kawasan nelayan Selat Madura (Kusnadi, 2000:10).

Kusnadi, 2000: 2-4, salah satu unsur potensi sosial tersebut adalah kaum masyarakat nelayan, khususnya istri nelayan. Kedudukan dan peranan kaum nelayan pesisir atau istri nelayan pada masyarakat pesisir sangat penting karena beberapa pertimbangan pemikiran:

1. Dalam sistem pembentukan kerja secara meningkat pada masyarakat nelayan, kaum nelayan pesisir atau istri nelayan mengambil peranan yang

besar dalam kegiatan sosial-ekonomi di darat, sementara laki-laki berperan di laut untuk meningkatkan dengan menangkap ikan. Dengan kata lain, darat adalah ranah perempuan, sedangkan laut adalah ranah laki-laki (Kusnadi 2000: 151-152).

2. Pembentukan system pembagian kerja di atas mengharuskan kaum masyarakat nelayan untuk selalu terlibat dalam kegiatan publik, yaitu meningkatkan keluarga sebagai antisipasi ibu rumah tangga jika suami mereka tidak memperoleh penghasilan. Kegiatan melaut merupakan kegiatan yang spekulatif dan terikat oleh musim. Oleh karena itu, nelayan yang melaut belum bisa dipastikan memperoleh penghasilan.
3. Pembentukan system pembagian kerja masyarakat nelayan dan tidak adanya kepastian penghasilan setiap hari dalam rumah tangga nelayan telah menempatkan perempuan sebagai salah satu pilar penyangga kebutuhan hidup rumah tangga.

Dengan demikian, dalam menghadapi kerentanan ekonomi dan kemiskinan masyarakat nelayan, pihak yang paling terbebani dan bertanggung jawab untuk mengatasi dan menjaga

kelangsungan hidup rumah tangga adalah kaum perempuan, istri nelayan (Kusnadi, 2000: 69-83). Dibandingkan dengan masyarakat lain, kaum perempuan di desa-desa nelayan mengambil kedudukan dan peranan sosial yang penting, baik di sektor domestik maupun di sektor publik. Peranan publik istri nelayan diartikan sebagai keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas sosial-ekonomi di lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan sekunder lainnya. Kaum perempuan di desa nelayan merupakan potensi sosial yang sangat strategis untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat nelayan secara keseluruhan. Oleh karena itu, potensi sosial-ekonomi kaum perempuan ini tidak dapat diabaikan begitu saja.

Pembentukan masyarakat nelayan merupakan suatu bagi sebuah negara di Indonesia, walau data yang valid tidak mudah diperoleh. Pengamatan visual/langsung ke kampung-kampung nelayan dapat memberikan gambaran yang jauh lebih gamblang tentang kemiskinan nelayan di tengah kekayaan laut yang begitu besar.

Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi pembentukan pemberdayaan masyarakat nelayan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah fakta-fakta

yang bersifat fisik berupa kualitas pembentukan masyarakat nelayan yang akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai papan yang terlihat usang, beratap rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh dan nelayan tradisional. Sebaliknya, rumah-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang perantara (ikan) atau pedagang berskala besar, dan pemilik toko (Kusnadi, 2000 & Sitorus, 2002).

Dalam peningkatan pendapatan hasil nelayan, akan sangat baik bagi para nelayan untuk lingkaran nelayan dan begitu saja bersaing dalam pemanfaatan hasil laut di era keterbukaan sekarang ini. Mereka akan selalu kalah bersaing dengan perusahaan penangkapan ikan, baik asing maupun nasional, yang berperlengkapan modern. Oleh karena itu, pemberdayaan komunitas nelayan merupakan langkah yang sangat krusial dalam mencapai tujuan pemanfaatan kekayaan laut Indonesia (Bappenas, 2005).

Salah satu cara untuk memperdayakan masyarakat nelayan antara lain dengan cara pemberdayaan komunitas nelayan yang harus dilakukan dengan tepat

dan harus berangkat dari kultur yang ada. Penekanannya harus kepada peningkatan kesadaran akan masalah dan potensi yang ada di dalam dan sekitar komunitas. Kalaupun ada bantuan dari luar komunitas (misalnya dari pemerintah, lembaga donor, atau LSM), sebaiknya jangan berbentuk sumbangan cuma-cuma (*charity*), melainkan berupa pancingan/stimulan bagi peningkatan kesadaran akan potensi sendiri serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan potensi tersebut. Bantuan dalam bentuk uang tidak boleh terlalu besar (karena akan 'memanjakan'). Tetapi juga jangan terlalu kecil (karena bisa tidak efektif dalam upaya mengangkat komunitas dari lingkaran kemiskinan). Besaran yang 'pas' akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi setiap komunitas nelayan dan mungkin tidak bisa disama ratakan.

Eliminasi faktor pendorong dan penekan (*push-pull factor*) buruknya kondisi sosial ekonomi nelayan yang dilakukan berbagai pihak harus menempatkan komunitas nelayan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Dalam hal ini, nelayan dirangsang supaya kreatif untuk menemukan strategi taktis untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Selain itu, kecenderungan nelayan yang hanya mengandalkan laki-laki menjadi pemeran utama dalam struktur produksi masyarakat

pantai yang berkarakter *out door* dan padat karya harus diimbangi dengan pemberdayaan perempuan menambah penghasilan keluarga di berbagai bidang pekerjaan kodrati (Sitorus, 2005).

Berkaitan dengan usulan konstruktif ini, dapat dirujuk hasil penelitian Kusnadi (2000:71) yang membuktikan bahwa strategi diversifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh nelayan di pantai Utara Jawa, ternyata dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat pantai karena semakin beragamnya sumber-sumber pendapatan dan akses ke sumber daya ekonomi yang luas dan fleksibel.

Hal yang ada ditemukan dari penelitian Sitorus (2002), dimana semakin luas bidang pekerjaan yang tersedia dalam struktur produksi yang dapat dimasuki oleh perempuan seiring dengan modernisasi dan sosialisasi pergerakan kemitra sejajaran gender. Diversifikasi mata pencaharian merupakan salah satu pilihan, yang dapat dilakukan di masa paceklik (angin barat), ataupun berlangsung dengan melibatkan anggota keluarga. Untuk nelayan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini, sebagian besar ibu rumah tangga terlibat dalam pekerjaan pasca-tangkap diantaranya kegiatan menjemur ikan, merebus, mengasin, dan melakukan pengepakan paket ikan asin. Selain itu, para wanita

nelayan tersebut juga ada yang bertani, beternak ayam, berjualan ke desa-desa lainnya, merajut jaring, mencari kerang-kerangan dan jamur laut, serta membudidayakan rumput laut. Sedangkan anggota keluarga lainnya yang telah dewasa, terlibat dalam perbaikan dan pembuatan kapal, bertani dan mengikuti bisnis transportasi darat, serta buruh nelayan. Dalam konteks ini, temuan Sitorus menunjukkan bahwa implikasi dari peranan perempuan yang bekerja secara nyata mampu meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga nelayan, tetapi tidak terdapat perubahan posisi di mana penghargaan yang diterimanya dari lawan jenisnya tetap menempatkannya dalam struktur yang sama dalam masyarakat pantai.

Kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian berada di dalam wilayah Kecamatan Asakota Kota Bima. Kelurahan Kolo merupakan sebagian kecil dari wilayah pesisir di Kota Bima, dimana Kota Bima ini hampir 30% dari luas wilayahnya terdiri dari wilayah pesisir (nelayan), yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Di Kelurahan Kolo terlihat rumah-rumah yang sangat sederhana dan perabotan seadanya. Sebagian besar ibu rumah tangga terlihat beraktifitas dalam pekerjaan menjemur, merebus dan mengasinkan ikan, mencari kerang, merajut jaring dan berbagai pekerjaan sambilan lainnya, mereka dengan segala kesadaran penuh

melakukan pekerjaan ini untuk dapat membantu menunjang kebutuhan ekonomi sosial rumah tangganya. Ibu rumah tangga nelayan harus pandai-pandai meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan agar sebagian kebutuhan hidup rumah tangganya bisa terakomodir.

Melihat lokasi Kelurahan yang berada sangat dekat dengan pusat kota dan terlebih lagi di Kota Bima, maka kondisi kehidupan ekonomi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo terlihat sangat konpak dengan masyarakat di Kelurahan lain dan hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Di Kelurahan tersebut juga tersedia sarana pasar ikan, Pusat Pelelangan Ikan (PPI) dan di Kelurahan sebelahnya yaitu Kelurahan Songgela terdapat sarana Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan dengan tersedianya sarana dan prasarana ini seharusnya masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo bisa bangkit dari nilai tinggi. Dan untuk komunitas masyarakat nelayan, dimana ibu rumah tangganya lebih banyak melewatkan waktu di darat, strategi ini harus menjadi bahan pemikiran Pemerintah Daerah.

Dalam sistim pembentukan strategi pemberdayaan masyarakat nelayan adalah :

1. Pembentukan tingkat modal usaha secara bergulir dan berkelanjutan baik berupa dana bantuan dari pihak pemerintah

kota, mengeluarkan dana triwulan maupun pertahun, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan untuk mendapatkan usaha yang lebih baik.

2. Pembentukan peningkatan pendidikan dan pelatihan untuk mengetahui tata cara dan mengelolah atau mengawetkan ikan dengan baik dan benar sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan dengan berkat adanya alat-alat teknologi yang canggih, sehingga dapat mengelolah hasil lautnya.

#### **B. Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa sajakah bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dengan partisipasi ibu rumah tangga ? 2. Bagaimana bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dengan partisipasi ibu rumah tangga ?. Tujuan Penelitian: untuk mengetahui bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis komunitas ibu rumah tangga di

Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Untuk mendiskripsikan bentuk strategi pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis komunitas ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Kegunaan penelitian: Dapat dijadikan sebagai langkah awal analisa tentang strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo melalui peranan ibu rumah tangga dalam kegiatan sosial ekonomi lokal sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Dapat menjadi rekomendasi bagi perencanaan di masa yang akan datang, sebagai dasar penajaman program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo. Secara akademis penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan sebagai bahan dalam strategi yang harus ditempuh untuk dapat memberdayakan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Kota Kecamatan Asakota Kota Bima dengan partisipasi ibu rumah tangga. Secara praktis dapat dijadikan bahan acuan atau pedoman bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian serupa serta sebagai data dan informasi yang cukup akurat dan ilmiah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Nelayan di Kelurahan Kolo.



### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan dasar penelitian *survey* yaitu dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis komunitas Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima”. Menurut Sugiyono (1994:3) penelitian *survey* adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi secara intensif terhadap subyek dan obyek yang diteliti baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek tertentu. Tipe penelitian digunakan tipe deskriptif yang menurut Nawawi (1993:63) adalah sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek, pada saat sekarang berdasarkan faktor yang tampak sebagaimana adanya. Walaupun penelitian ini tergolong deskriptif bukan berarti hanya akan mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh. Akan tetapi akan dilakukan analisa dan interpretasi yang mendalam sehingga akan memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota

Kota Bima. Menurut Sugiyono (1994:57) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kuantitas dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan “Populasi bukan hanya orang tetapi juga benda-benda lain, yaitu bukan hanya sekedar jumlah tetapi meliputi karakteristik/sifatnya. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Suharsimin Arikunto (1998 : 178) ,” Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Mengingat populasi dalam penelitian ini relatif besardandianggap sama, maka peneliti dalam penentuan jumlah sampel ini dilakukan dengan mengikuti pendapat Ringarimbun dan Efendy (1989:159), yang mengemukakan sebagai berikut: “Bila populasinya diatas 100 dan karakteristiknya homogen, maka untuk menentukan sampelnya dapat cukup hanya 10% dari jumlah subjek tersebut”. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data bergerak dari lapangan empiris dalam upaya membangun teori data, proses pengumpulan data proses ini meliputi berbagi tahap yaitu: a. Penelitian pustaka yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang didukung oleh teori-teori atau definisi-definisi yang dikutip dari para ahli dan padat pula berupa laporan dari jawatan atau

instansi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta dapat pula berupa majalah atau brosur. b. Penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sekaligus merupakan obyek atau faktor-faktor yang menunjang serta ada kaitannya dengan penelitian ini. Untuk melakukan penelitian lapangan ini data yang dikumpulkan tersebut akan diperoleh dengan cara sebagai berikut: a. Pengamatan yaitu dengan melaksanakan observasi secara langsung pada lokasi penelitian dan pada obyek atau faktor-faktor yang menjadi sasaran dalam rencana penyusunan skripsi ini sehingga akan diperoleh data yang mendukung rencana kegiatan penelitian ini. b. Dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan alat pengumpul data dengan mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan dan sebagainya. Versi Linton (dalam Latief 2000 : 91) teknik dokumentasi ini disebut metode rekonstruksi histories. Metode *rekonstruksi histories* merupakan metode untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Metode ini mengandalkan kepada bukti-bukti dokumen sezaman meskipun selalu tidak akan pernah lengkap. Dengan dokumen-dokumen itu dapat dilakukan rekonstruksi atas peristiwa yang telah berlangsung. c.

Wawancara. Dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih memahami berbagai data dan informasi sekunder. Menurut Kartono (2002:187), bahwa "*Interview* atau wawancara itu adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan judul penelitian. Guna memudahkan untuk menganalisa, penulis mengidentifikasi sebagai berikut: a. Strategi Pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis ibu rumah tangga. b.

Strategi pemberdayaan nelayan yang mempengaruhi nilai pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis ibu rumah tangga. a. Strategi Pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis ibu rumah tangga dengan pemberian modal usaha dan mengadakan pelatihan. b. Strategi pemberdayaan nelayan untuk mempengaruhi nilai keberhasilan pemberdayaan ekonomi sosial. Untuk menganalisa data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini, baik yang diperoleh melalui *interview*, *observasi* dan dokumentasi, diolah secara kualitatif. Analisa secara diskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan penggambaran dan pemaparan secara akurat dan aktual,



sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan secara gamblang permasalahan yang diteliti.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian

#### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan masyarakat mulai dibicarakan sekitar tahun 90-an. Istilah tersebut kemudian menjadi pembicaraan tersendiri didalam tubuh pemerintahan dan mulai disosialisasikan didalam program-program turunan dari pemberdayaan masyarakat tersebut. Ir. Tatag Wiranto, MURP Direktur Kerja Sama Pembangunan Sektorale Bappenas mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat menghasilkan masyarakat yang berdaya bukan yang terpedaya, sehingga mereka mampu mandiri dan tidak tergantung pada uluran tangan bantuan orang lain. Banyak para ahli yang membahas tentang konsep pemberdayaan, antarlainseperti yang dikemukakan oleh Payne (Simatupang Ichwan, 2006), yang mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Bahwa dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi terjadinya eksploitasi oleh kelompok lain. Melalui pintu keluar tersebut akan mengurangi isolasi dengan bertambahnya akses terhadap informasi, peluang ekonomi dan tumbuhnya rasa percaya diri. Demikian juga halnya terhadap faktor-faktor yang lain seperti kerentaan, kelemahan fisik dan pada akhirnya terhadap kemiskinan. Dengan demikian, melalui proses yang bersifat kumulatif dan saling memperkuat dari faktor-faktor penangkap kemiskinan tersebut, kemiskinan akan semakin berkurang dengan terwujudnya pemberdayaan politik, sosial dan ekonomi Soetomo, 2006:408).

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta penyandang cacat adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan.

Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari “keumuman” kerap kali dipandang sebagai “debiants” (penyimpangan), mereka sering kali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Schuler, Hashemi dan Riley (Dalam Suharto, 2005:63-66) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu : ‘kekuasaan di dalam’ (power within), ‘kekuasaan untuk’ (power to), ‘kekuasaan atas’ (power over) dan ‘kekuasaan dengan’ (power with). Adapun delapan indikator pemberdayaan sebagai berikut :

1. Kebebasan Mobilitas : Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah

tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil : kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu), kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampoo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, Koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator diatas, pola tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa minta ijin pasangannya, terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga” mampu membuat

keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri, mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.

5. Kebebasan *relative* dari dominasi keluarga : responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya : yang melarang mempunyai anak atau melarang bekerja diluar rumah.
6. Kesadaran hukum dan politik : mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, seorang anggota DPRD setempat, nama presiden, mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum ahli waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan proses-proses : seorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri-istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
8. Jaminan ekonom dan kontribusi terhadap keluarga : memiliki

rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Pelaksanaan proses pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapa pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 1997:218-219).

1. Pemungkinan : Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan suktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kemampuan dan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan pesanan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang kesempatan berusaha.

a. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan social adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial seperti memiliki kepercayaan diri maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Suatu keadaan *realitas factual (social)* sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, minimal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusiayaitu : tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi rumah, MCK, penerangan, dan kebutuhan air minum. Realitas membuktikan bahwa kehidupan nelayan tradisional tidak pernah beranjak dari kemiskinan, kemelaratan dan ketertinggalan.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai

oleh sebuah perubahan ekonomi yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, serta sejauh mana seseorang dapat mengurus aktivitas ekonominya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata “*empowerment*” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*selfreliant communities*), sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka (Moebiyarto, 1996) dalam Wahyono, 2001.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people-centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community based management*), yang

merupakan ekanisme perencanaan *people-centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaransosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya (*empowerment*). Dalam kaitan ini, Moebiyarto (1999), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi:

- a) Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya.
- c) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistik.
- d) Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan

mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi.

- e) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, yang mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat. Pengelolaan berbasis masyarakat atau biasa disebut Community-Based Management, menurut Nikijuluw (1994) dalam Latama (2002), merupakan pendekatan pengelolaan sumberdaya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu mereka juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaan (religion). Carter (1996) dalam Latama (2002) memberikan definisi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai : *“A strategy for achieving a people-centered development where the focus of*

*decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the communities of that area”* atau sebagai suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, di mana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan di suatu daerah berada di tangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keberdayaan masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai proses adaptasi masyarakat nelayan terhadap lingkungannya merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people centered development*), yang melandasi wawasan pengelolaan sumberdaya lokal (*community-based resource anagement*). Pentingnya memperhatikan aspek strategi adaptasi nelayan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut adalah karena strategi adaptasi yang dikembangkan memungkinkan nelayan mengatur daya tahan (*resilience*) terhadap persoalan-persoalan spesifik yang berhubungan pesisir dan nelayan



seperti fluktuasi, ketidakpastian hasil tangkapan, musim, dan menurunnya sumberdaya perikanan.

## 2. Wilayah Pesisir

Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Brahtz, 1972; Soegiarto, 1976; Beatly, 1994) dalam Direktorat Jendral Pesisir dan Pulau Kecil (2003). Dahuri, dkk. (1996) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah *yurisdiksi* wilayah propinsi atau state di suatu negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan

oleh kelandaian pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil.

Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Dalam cakupan horizontal, wilayah pesisir di batasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, ke arah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografis (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan sebagainya) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, ke arah laut meliputi daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar dan sebagainya).

Wilayah perbatasan ini mempertemukan lahan darat dan masa air yang berasal dari daratan yang relatif tinggi (elevasi landai, curam atau sedang) dengan masa air laut yang relatif rendah, datar, dan jauh lebih besar volumenya. Karakteristik yang demikian oleh Ghofar (2004), mengatakan bahwa

secara alamiah wilayah ini sering disebut sebagai wilayah jebakan nutrient (*nutrient trap*). Akan tetapi, jika wilayah ini terjadi pengrusakan lingkungan secara massif karena pencemaran maka wilayah ini disebut juga sebagai wilayah jebakan cemaran (*pollutants trap*). Dengan demikian dapat dimengerti bahwa berbagai sumberdaya hayati serta lingkungan di wilayah pesisir relatif lebih rentan terhadap kerusakan, dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau ekosistem-ekosistem lainnya. Dari seluruh tipe ekosistem yang ada, biasanya ekosistem pesisir merupakan wilayah yang mendapatkan tekanan lingkungan yang paling berat (Kay dan Alder, 1999) dalam Ghofar (2004).

### 3. Nelayan

Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang secara sengaja, keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Beberapa kelompok nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan juga sering ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan di antara sesama nelayan maupun di dalam hubungan bermasyarakat seperti dipaparkan Towasley (Dirjen Perikanan, Departemen Pertanian,

1988) mendefinisikan yang disebut nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan binatang atau tanaman air dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat perahu kapal, dan juga mengangkut ikan tidak termasuk sebagai nelayan. Demikian juga istri, anak dan anggota keluarga yang lain tidak termasuk sebagai nelayan.

## B. Potensi Sumber Daya Alam Pesisir

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (Clark, 1996). Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam, sumberdaya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir. Dahuri (1999), potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (1) sumberdaya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*), (3) energi kelautan dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*). Sumberdaya

yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersediaan lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan.

Demikian juga dengan wilayah perairan pantainya dapat dikembangkan untuk berbagai kegiatan budidaya terutama budidaya laut. Sumberdaya tidak dapat pulih meliputi mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas. Sumberdaya energi terdiri dari OTEC (*Ocean Thermal Energy Conservation*), pasang surut, gelombang dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut. Wilayah pesisir dan laut sebagai ekosistem yang dinamis memiliki karakteristik yang sangat unik. Keunikan wilayah ini mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut untuk dikelola secara terpadu dan bijaksana. Secara biofisik wilayah pesisir memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Secara empiris terdapat keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas (*upland*) dengan laut lepas. Perubahan

yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan (industri, pertanian, pemukiman, dan lainlain) di lahan atas (*upland*) suatu DAS (Daerah Aliran Sungai) tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut.

- b. Dalam suatu kawasan pesisir, biasanya terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumberdaya alam.
- c. Dalam suatu kawasan pesisir, pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat (orang) yang memiliki keterampilan/keahlian dan kesenangan (*preference*) bekerja yang berbeda sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Pada hal sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk

mengubah kesenangan bekerja (*profesi*) sekelompok orang yang sudah mentradisi menekuni suatu bidang pekerjaan.

- d. Baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur (*single use*) adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk satu peruntukan, seperti tambak, maka akan lebih rentan, jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan.
- e. Kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama (*common property resources*) yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (*open access*). Pada hal setiap sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran over eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang seringkali terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama (*open tragedy*). Kawasan pesisir memiliki tiga habitat utama (*vital*) yakni mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Di antara ketiga habitat

tersebut terdapat hubungan dan interaksi yang saling mempengaruhi. Kerusakan yang terjadi pada satu habitat akan mempengaruhi kehidupan biota pada habitat lainnya, sehingga pengelolaan pada suatu habitat harus mempertimbangkan kelangsungan habitat lainnya.

### C. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

Pengelolaan sumberdaya alam adalah usaha manusia dalam mengubah ekosistem untuk memperoleh manfaat maksimal, dengan mengupayakan kesinambungan produksi dan menjamin kelestarian sumberdaya tersebut (Afiati, 1999). Pengelolaan perikanan yang baik dan bertanggung jawab terutama perikanan tangkap haruslah benar-benar memperhatikan daya dukung sumberdaya perikanan di wilayah perairan Indonesia, bahkan Purwanto (2003), secara eksplisit mengungkapkan bahwa apabila sumberdaya ikan laut yang hidup dalam wilayah perairan Indonesia dimanfaatkan secara benar dan bertanggung jawab yaitu tidak melebihi daya dukungnya, sumberdaya tersebut akan dapat menghasilkan produksi maksimum lestari sekitar 6,4 juta ton pertahun. Selain itu masyarakat Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di laut lepas (*high sea*). Sebaliknya bila sumberdaya ikan

tersebut dimanfaatkan melebihi daya dukungnya, kelestarian sumberdaya ikan akan terancam dan produksinya akan menurun. Ketersediaan (*stok*) sumberdaya ikan pada beberapa daerah penangkapan (*fishing ground*) di Indonesia ternyata telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya sehingga kelestariannya terancam. Beberapa spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan bahkan nyaris hilang dari perairan Indonesia (Purwanto, 2003).

Lebih lanjut dikatakan pula bahwa ancaman ini diperkirakan akan meningkat pada dekade ini, karena terjadi pergeseran daerah penangkapan armada perikanan dunia ke daerah yang masih potensial, termasuk perairan Indonesia, baik secara legal maupun ilegal. Pengelolaan Sumberdaya alam pesisir pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Dalam pengelolaan lingkungan sumberdaya alam pesisir tidaklah bersifat serta merta atau latah, namun kita perlu mengkaji secara mendalam isu dan permasalahan mengenai sumberdaya yang hendak dilakukan pengelolaan. Penting atau tidaknya sumberdaya alam yang ada, potensi

dan komponen sumberdaya mana yang perlu dilakukan pengelolaan dan apakah terdapat potensi dampak perusakan lingkungan, serta untung atau tidaknya sumberdaya tersebut bagi masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam pengelolaan. Pengelolaan sumberdaya alam yang beranekaragam, baik di daratan maupun di lautan perlu dilakukan secara terpadu dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan (Rais, 1997). Pengelolaan sumberdaya alam pesisir dilakukan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Secara ideal pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan hidupnya harus mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan pantai yang ekonomis dan produktif. Keberlanjutan fungsi ekologis akan menjamin eksistensi sumberdaya serta lingkungan hidup ikan (Anggoro, 2004). Menurut Supriharyono (2000), beberapa pertimbangan dalam pengelolaan sumberdaya alam kawasan pesisir yakni meliputi (a) pertimbangan ekonomis, (b) pertimbangan dari aspek lingkungan dan (c) pertimbangan sosial budaya. Pertimbangan



ekonomis menyangkut penting tidaknya untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, penghasil barang-barang yang dapat dipasarkan, merupakan aset lokal, nasional atau internasional serta merupakan aset pariwisata yang dapat menghasilkan uang selain berupa barang. Pertimbangan lingkungan menyangkut stabilitas fisik pantai, lingkungan masyarakat yang unik, penyediaan stok hewan dan tumbuhan termasuk yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan, pelestarian plasma nutfah, estetika dan identitas budaya, serta apakah terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sedimentasi, konstruksi, pertanian, penebangan, penambangan, penangkapan berlebihan (*overfishing*), *yutrofikasi* karena buangan limbah yang mengandung nutrisi, dan kontaminasi oleh berbagai macam limbah. Sedangkan pertimbangan sosial budaya meliputi pengakuan tradisi, nilai sosial budaya, mempertahankan tradisi generasi yang akan datang, sasaran keagamaan.

Pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan secara berkelanjutan (*sustainable*) harus dilakukan secara bertanggung jawab (*responsible*), sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan yang sangat hati-hati (Ghofar, 2004). Dewasa ini, sayangnya, pengetahuan yang memadai mengenai proses-proses yang terjadi di kawasan pesisir dan lautan Indonesia belum tersedia secara memadai untuk suatu

tujuan pemanfaatan yang rasional. Sebagai akibatnya adalah konsep dan teknik pengelolaan perikanan kawasan pesisir dan lautan sebagian besar belum teruji. Selain degradasi lingkungan, beberapa isu penting lainnya adalah lemah atau masih rendahnya partisipasi masyarakat, sistem hukum dan penegakannya, keamanan di laut, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.

#### **D. Strategi Diversifikasi Pekerjaan di Kalangan Nelayan dan Partisipasi Ibu Rumah Tangga**

Dalam buku Pembangunan Berspektif Gender, Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia (2005:154,163), dipaparkan bahwa secara tradisional, para ekonomi dan analisis kebijakan cenderung memandang rumah tangga sebagai unit yang menyatukan penghasilan dan mengalokasikan semua sumber daya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi dan investasi, seolah rumah tangga hanya mempunyai seperangkat preferensi tunggal. Pandangan ini mempengaruhi penyusunan dan perancangan kebijakan dan program. Pentingnya alokasi dan intervensi kebutuhan gender dalam usaha meningkatkan kesetaraan gender dan mengefektifkan pembangunan. Intervensi yang bertujuan meningkatkan akses perempuan ke sumber daya dan aset produksi dapat meningkatkan otonomi dan status



perempuan dalam rumah tangga, serta dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak-anak.

Berbagai macam faktor yang melatarbelakangi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat nelayan, mempersulit untuk dapat mengatasi secara efektif dan efisien persoalan tersebut. Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan nelayan, Pemerintah telah menggulirkan berbagai program pembangunan, namun hasil yang dicapai tidak cukup menggembirakan.

Menurut Kusnadi (2002:66), pilihan rasional dan kontekstual yang bisa dikembangkan untuk kepentingan jangka panjang adalah melakukan diversifikasi pekerjaan di kalangan nelayan dan anggota-anggota rumah tangganya. Dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, diharapkan sumber-sumber pendapatan nelayan semakin beragam dan akses ke sumber daya ekonomi akan lebih luas serta fleksibel. Setiap individu anggota rumah tangga nelayan dituntut untuk saling berusaha keras dan bekerja secara kolektif dalam mengejar masa depan kehidupan yang lebih baik.

Kegiatan-kegiatan ekonomi tambahan yang dilakukan oleh anggota-anggota rumah tangga nelayan (istri dan anak) merupakan sebagian dari strategi adaptasi yang

harus ditempuh untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Ragam peluang kerja yang bisa dimasuki oleh mereka sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia di desa-desa nelayan tersebut. Setiap desa nelayan memiliki karakteristik kondisi sosial ekonomi yang berbeda dengan desa lainnya. Berbagai upaya yang dilakukan oleh anggota-anggota rumah tangga nelayan, semata-mata untuk memenuhi tuntutan kebutuhan konsumtif yang bersifat subsistensi, bukan kebutuhan yang bersifat produktif (Kusnadi, 2002:55).

Masih ada strategi lain yang digunakan oleh nelayan untuk mengkombinasikan pekerjaan, dimana kegiatan menangkap ikan dilakukan secara bergantian dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Salah satu upaya untuk membangun dan mengembangkan kemandirian hidup itu adalah dengan mengharapakan kesediaan dan kesadaran istri bekerja untuk menunjang ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil/tradisional. Keterbatasan kapasitas dan teknologi alat tangkap menjadi penghalang bagi nelayan-nelayan tradisional untuk mengakumulasi sumber daya sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kerawanan ekonomi dan kecemasan sosial senantiasa membayangi kehidupan mereka setiap saat (Kusnadi, 2006:75).

Bagi rumah tangga nelayan kecil atau buruh nelayan, istri bekerja akan menjadi pintu pembuka untuk melakukan mobilitas sosial secara *vertical*. Nasib baik dan rezeki yang akan mengubah keluarga nelayan tersebut menjadi keluarga yang sukses secara sosial ekonomi. Banyak kasus menunjukkan bahwa munculnya pedagang-pedagang ikan berskala besar bermula dari istri-istri nelayan kecil yang bekerja maksimal untuk meraih keberhasilan ekonomi. Kalau keberhasilan melalui mobilitas *vertical* dicapai dengan baik, motivasi istri bekerja tidak lagi bersifat ekonomis, tetapi jua terdorong untuk aktualisasi diri, kredibilitas dan membangun status sosial. Motivasi demikian merupakan ciri pelaku yang dominan bagi perempuan pesisir yang sukses dalam usaha ekonominya.

Diakui oleh para istri nelayan yang bekerja sebagai pekerja atau buruh bahwa mereka lebih menyukai bekerja mandiri, punya usaha sendiri. Akan tetapi harapan tersebut sulit diwujudkan karena mereka tidak memiliki cukup modal usaha. Demikian juga bagi perempuan pesisir yang sudah memiliki usaha mandiri, mereka belum bisa secara optimal meningkatkan usahanya karena keterbatasan modal (Kusnadi, 2006:78-83).

Persoalan pengembangan usaha ekonomi dikalangan istri nelayan tidak hanya terbentur kebutuhan

pada kebutuhan modal, tetapi juga terbatasnya keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan jaringan pemasaran produk yang banyak bergantung pada peran pengusahaan besar atau pengepul produk. Selain itu, akses modal ke lembaga perbankan formal sulit dilakukan karena harus menyerahkan syarat-syarat agunan, seperti sertifikat tanah dan rumah. Bantuan kredit modal untuk usaha produktif juga tidak ada. Faktor-faktor ini yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi perempuan pesisir.

Motivasi paling utama perempuan pesisir bekerja mencari penghasilan adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan suami dalam kegiatan nelayan kurang mencukupi. Faktor yang menyebabkan penurunan penghasilan nelayan karena kegiatan melaut sangat bergantung pada irama musim dan iklim, kapasitas sarana penangkapan dan keberuntungan. Dengan demikian, sifat pekerjaan dan pendapatan nelayan adalah spekulatif dan tidak pasti. Situasi pendapatan nelayan yang demikian merupakan alasan sngat kuat bagi istri nelayan untuk ikut bekerja mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga. Hal ini dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa paksaan dengan restu dari suami.

Perangkap kemiskinan yang melanda kehidupan nelayan

disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, akses dan jaringan perdagangan ikan yang eksplotatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak *negative* modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan (Mubyarto dalam Kusnadi 2002).

Sisi lain yang perlu dikembangkan dalam masyarakat nelayan adalah pembinaan perempuan nelayan. Dari berbagai hasil penelitian. Keterlibatan perempuan belum bisa dioptimalkan. Misalnya kaum perempuan turut membantu suami mencari penghasilan. Memang terbatasnya usaha non perikanan di desa pantai, membuat peluang kerja kaum perempuan membantu menambah pendapatan keluarga sangat kecil. Oleh karena itu, LSM atau instansi pemerintah dapat menggali potensi local sesuai dengan kekhasan masing-masing desa pantai. Seperti pemberdayaan perempuan di desa pantai yang memungkinkan usaha beternak itik, karena pasang surut banyak terdapat plankton laut yang dapat dikonsumsi sebagai pakan ternak. Tentu saja agar upaya tersebut berjalan optimal, diperlukan pengetahuan budidaya. Masih banyak peluang desa pantai

untuk menciptakan diversifikasi usaha sehingga pada musim paceklik nelayan tidak terilit hutang lebih banyak pada lintah darat (Kophalindo, 2002:365-366).

Hal senada ditemukan dari penelitian Sitorus (Dalam Sitorus, 2005:13), dimana semakin luas bidang pekerjaan yang tersedia dalam struktur produksi yang dapat dimasuki oleh perempuan seiring dengan modernisasi dan sosialisasi pergerakan kemitraan sejajar gender. *Diversifikasi* mata pencaharian merupakan salah satu pilihan, yang dapat dilakukan di masa paceklik (angin barat), ataupun berlangsung dengan melibatkan anggota keluarga.

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### A. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Masyarakat Nelayan Berbasis Komunitas Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima

Motivasi paling utama ibu rumah tangga nelayan bekerja mencari penghasilan adalah untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari karena pendapatan suami dalam kegiatan nelayan kurang mencukupi. Faktor yang menyebabkan penurunan penghasilan nelayan karena kegiatan melaut sangat bergantung pada irama musim dan iklim, kapasitas sarana

penangkapan dan keberuntungan. Dengan demikian, sifat pekerjaan dan pendapatan nelayan adalah spekulatif dan tidak pasti. Situasi pendapatan nelayan yang demikian merupakan alasan sangat kuat bagi istri nelayan untuk ikut bekerja mengatasi kesulitan ekonomi rumah tangga. Hal ini dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa paksaan dengan restu dari suami.

Ada beberapa usaha ibu rumah tangga untuk membantu kebutuhan rumah tangga yang meliputi sebagai berikut :

1. Membuat agar-agar.
2. Mengawetkan ikan.
3. Mengkeringkan ikan dan.
4. Serta menjual ikan di pasar hasil nelayan.

Ada 4 faktor diatas yang mendorong untuk kepentingan setiap hari, persoalan pengembangan usaha ekonomi dikalangan istri nelayan tidak hanya terbentur kebutuhan pada kebutuhan modal, tetapi juga terbatasnya keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan jaringan pemasaran produk yang banyak bergantung pada peran pengusahaan besar atau pengepul produk. Selain itu, akses modal ke lembaga perbankan formal sulit dilakukan karena harus menyerahkan syarat-syarat agunan, seperti sertifikat tanah dan rumah. Bantuan kredit modal untuk usaha produktif juga

tidak ada. Faktor-faktor ini yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi perempuan pesisir (kunsadi, 2006:78-87).

Berkaitan dengan usaha pekerjaan ibu rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemangku kepentingan diharapkan mampu mencari potensi baik kewilayahan, maupun keterampilan masyarakat nelayan. Hal ini perlu, agar ada yang lebih menungtungkan, apakah melalui upaya pengembangan pariwisata setempat, pengolahan hasil tangkapan laut menjadi makanan khas, hingga upaya budidaya ikan. Selain itu perlu membangun jejaring diantara pemangku kepentingan berdasarkan kapastitasnya. Misalnya LSM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, pemerintah memberikan dukungan perizinan dan fasilitas dan pengusaha memberikan bantuan modal. Dengan konsep ini, diharapkan kondisi paceklik, tidak akan terlalu besar dampaknya bagi masyarakat nelayan karena sudah terbentuk *alternative* pekerjaan yang sama-sama menguntungkan.

Dalam memberdayakan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan tersebut Dinas-dinas Pemerintah Kota Bima telah memberikan dana bantuan untuk ibu rumah tangga nelayan yang berada di Kelurahan Kolo, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Kepala dinas perikanan dan kelautan kota bima  
: 1 orang
2. Sektaris lurah : 1 orang
3. Dinas Perikanan dan kelautan  
: 40 orang
4. Nelayan  
: 62 orang
5. Ibu rumah tangga  
: 60 orang

Jadi Ibu rumah tangga nelayan yang mendapat bantuan dari pemerintah Kota Bima yaitu sebanyak 164 orang. Di dalam bantuan pemerintah kota bima ibu rumah di kelurahan kolo mendapatkan dana bantuan triwulan baik pertahun dapat dikelola oleh ibu rumah tangga secara bergulir dan berkelanjutan dan seterusnya.

Jadi beberapa strategi untuk dapat memberdayakan ekonomi sosial masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota sebagai berikut :

1. Strategi menumbuhkembangkan kesadaran dari komunitas ibu rumah tangga nelayan agar berpartisipasi ikut bekerja untuk menunjang sosial ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil tradisional.
2. Strategi menjadikan komunitas ibu rumah tangga sebagai basis dan memegang peranan sentral dalam mengelola potensi

sumberdaya sosial-ekonomi rumah tangga.

3. Strategi memanfaatkan kedudukan dan peranan ibu rumah tangga yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan.
4. Strategi menerapkan diversifikasi pekerjaan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota dikalangan komunitas ibu rumah tangga.

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat nelayan berbasis komunitas ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dengan partisipasi ibu rumah tangga, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama dan partisipasi Pemerintah Camat menindaklanjuti perkembangan usaha dari tradisional menjadi modern, seperti memupuk modal usaha, memberikan bantuan alat pengawetan ikan berupa Kul Box, sehingga ikan yang dibutuhkan oleh pembeli tetap segar.

2. Menyiapkan fasilitas usaha untuk pengeringan ikan untuk menindaklanjuti apabila ikan hasil tangkapan berkelebihan dapat dilakukan pengeringan dengan menggunakan jarring.
3. Kebutuhan pasar terhadap ikan kering, ikan segar atau rumput laut (agar-agar) sangat tinggi.
4. Sering dilakukan sosialisasi/ penyuluhan yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat ibu rumah tangga nelayan oleh pemberdayaan perempuan/Dinas Sosial Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dengan partisipasi ibu rumah tangga terdiri dari dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

Adapun faktor pendukungnya yaitu Pemerintah Camat menindaklanjuti perkembangan usaha dari tradisional menjadi modern, menyiapkan fasilitas usaha untuk pengeringan ikan, kebutuhan pasar terhadap ikan kering, ikan segar atau rumput laut (agar-agar) sangat tinggi, sering dilakukan sosialisasi/ penyuluhan yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat ibu rumah tangga nelayan oleh Dinas Sosial Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

Faktor penghambatnya yaitu Para Ibu rumah tangga lebih menyukai bekerja mandiri dan memiliki usaha sendiri, namun harapan tersebut sulit diwujudkan karena mereka tidak memiliki cukup modal usaha, keterbatasan modal dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan jaringan pemasaran produk.

- a. Ibu rumah tangga sangat bersyukur dan berterimakasih kepada dinas perikanan dan kelautan karena sudah mengeluarkan dana bantuan tersebut, dengan adanya dana bantuan tersebut, mereka tidak hanya berdiam diri menunggu penghasilan suami mereka, tetapi mereka juga bisa membantu suaminya dengan usaha kecil-kecilan dari dana yang diberikan oleh dinas perikanan dan kelautan tersebut.
- b. Para nelayan (suami) juga bersyukur dan berterimakasih kepada dinas perikanan dan kelautan karena sudah ikhlas mengeluarkan dana tersebut, dengan dana tersebut istri-istri mereka sangat membantunya, dan dari dana tersebut juga bukan Cuma usaha kecil-kecilan saja yang mereka kelola, tetapi ada juga dari mereka yang mengelola dana tersebut dengan sebaiknya, sehingga mereka mendapatkan



dana yang lebih cukup untuk usaha yang lebih besar lagi, mereka (suami) sangat senang dan bangga sekali dengan dikeluarkan modal tersebut, karena bagi mereka (suami) dari dana tersebut sangat membantu kebutuhan rumah tangga sehari-hari, karena penghasilan para nelayan tidak menentu, kalau cuanya tidak mendukung kadang penghasilannya kurang bahkan tidak ada sama sekali, jadi untuk keperluan sehari-hari sangat sulit.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 1. Beberapa strategi yang harus dikembangkan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir berbasis ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima yaitu: Strategi menumbuhkembangkan kesadaran dari komunitas ibu rumah tangga nelayan agar berpartisipasi ikut bekerja untuk menunjang sosial ekonomi rumah tangga nelayan, khususnya bagi nelayan kecil tradisional, Strategi menjadikan komunitas ibu rumah tangga sebagai basis dan memegang peranan sentral dalam mengelola potensi sumberdaya sosial-ekonomi rumah tangga, Strategi memanfaatkan

kedudukan dan peranan ibu rumah tangga yang merupakan modal sosial untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat nelayan, Strategi menerapkan diversifikasi pekerjaan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota kalangan komunitas ibu rumah tangga. 2. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir berbasis ibu rumah tangga di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima yaitu terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah adanya kerja sama dan partisipasi Pemerintah Camat menindaklanjuti perkembangan usaha dari tradisional menjadi modern, menyiapkan fasilitas usaha untuk pengeringan ikan, kebutuhan pasar terhadap ikan kering, ikan segar atau rumput laut (agar-agar) sangat tinggi, sering dilakukan sosialisasi/ penyuluhan yang menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat ibu rumah tangga nelayan oleh Dinas Sosial Kelautan dan Perikanan Kota Bima. Faktor penghambatnya yaitu Para Ibu rumah tangga lebih menyukai bekerja mandiri dan memiliki usaha sendiri, namun harapan tersebut sulit diwujudkan karena mereka tidak memiliki cukup modal usaha, keterbatasan modal dan keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan jaringan pemasaran produk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Farid, 1997, Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimin, 1998; Prosedur Penelitian, Rineka Cipta Jakarta.
- Bappeda NTB, 2001, Pokok-Pokok Arah Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NTB.
- Dahuri, 2003, Paradigma Baru Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Orasi Ilmiah) IPB, Bogor.
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001. Laporan Tahunan 1999-2000.
- Dinas Perikanan dan Kelautan, 2012, Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Kota Bima.
- Hadi, Sutrisno, 1984, Metodologi Research Jilid I, Andi, Yogyakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1996; Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Haji Masagung Jakarta.
- Kamaluddin, laode M, 2005, Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi, Orasi Ilmiah : Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi Indonesia Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kartono, Kartini, 2002, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Kusnadi, 2000, Akar Kemiskinan Nelayan, LKIS, Yogyakarta.
- ....., 2002, Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan, LKIS Yogyakarta.
- Ndraha, T, 1989; Pembangunan Masyarakat, mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nikijuluw, V.P.H, 2002, Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Kerja sama Pusat Pemberdayaan Pembangunan Regional (P3R) dengan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- ....., 2005, Politik Ekonomi Perikanan Bagaimana dan Kemana Perikanan?, PT. Fery Agung Corpotaion, Jakarta.
- ....., 2002, Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- R,Hilaliyah, 2004, Arah Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten dan Kota Bima, tidak dipublikasikan.
- Radiarta, 2004, Pemetaan Kelayakan Lahan untuk Pengembangan

- Usaha Budidaya Laut di Teluk saleh, Nusa Tenggara Barat, Jurnal Perikanan Budidaya 2004.
- Sadhori, Naryo, 2005, Budidaya Rumput Laut, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugandi, 1996, Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan di Indonesia, bahan Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Lembaga Penelitian IPB dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri RI dan Bank Pembangunan Asia.
- Suharto, Edi. 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Refika Aditama. Bandung.
- Sugiyono, 1997; Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta. Bandung.
- Supriharyono, M.S, 2000, Pelestarian dan Pengelolaan Sumberdata Alam di Wilayah Pesisir Tropis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.